KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun dengan baik.

Penyusunan LKIP ini diterbitkan sebagai suatu realisasi kegiatan BPRD Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar menjadi salah satu instransi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan prinsip *good governance* sebagai syarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, tepatguna, dan bertanggung jawab serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya sehingga LKIP BPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Semoga LKIP BPRD Tahun Anggaran 2019 ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja instansi Pemerintah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi selama satu tahun anggaran tertentu. LKIP Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan dari rencana kegiatan tahun 2019 pada Badan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan LKIP tahun 2019 sepenuhnya mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka materi dan substansi dalam Perjanjian Kinerja dan LKIP Badan Pajak dan retribusi Daerah masih mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2017-2022. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi dan merupakan cerminan bagi keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

LKIP Tahun Anggaran 2019 menyajikan semua capaian kerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target atau rencana dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja *output* dan *outcome*) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarannya dengan menyajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

Jakarta, 31 Januari 2020
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Sri Haryati
NIP 197202191998031006

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku unsur perangkat daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dari sektor pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki fungsi sebagai ***penunjang pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah***. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang keuangan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa BPRD memiliki 1 (satu) Sekretariat , 4 (empat) Bidang dan 5 (lima) Suku Badan dimasing-masing wilayah kota. Disamping itu, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dibentuk pula 43 (empat puluh tiga) Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan, 5 (lima) Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas **melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah** serta untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran BPRD;
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPRD;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Penyelesaian, pembetulan, pembatalan, pengurangan kerugian, pembebasan, penghapusan, keberatan banding dan gugatan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana serta sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
i. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah;
j. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
l. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
m. Penyuluhan dan layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
o. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
p. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD; dan
q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD..

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 8 huruf (d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun struktur organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

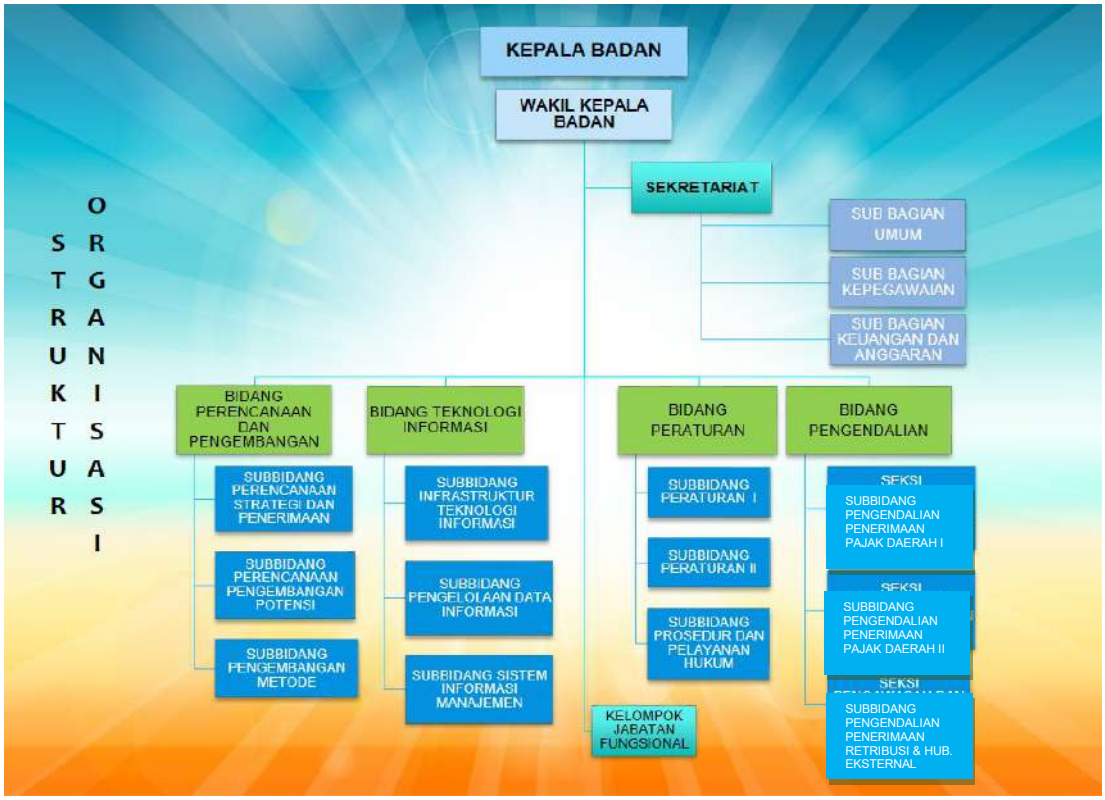

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Suku Badan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan berkompeten dalam bidangnya. Adapun posisi pegawai per 31 Desember 2019 berjumlah 804 orang, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Komposisi SDM menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				JUMLAH
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	
1	S-3	-	-	-	-	**-**
2	S-2	2	51	39	55	**147**
3	S-1	-	6	43	379	**428**
4	D-IV	-	-	-	-	**-**
5	D-III	-	-	1	147	**148**
6	SMA	-	-	-	75	**75**
7	SMP	-	-	-	5	**5**
8	SD	-	-	-	1	**1**
JUMLAH		**2**	**57**	**83**	**662**	**804**

Tabel 1.2.
Komposisi SDM menurut Golongan dan Kelompok Usia

NO	GOLONGAN	RUANG	JABATAN				JUMLAH
			ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	
1	Golongan IV	e	-	-	-	-	**-**
		d	-	-	-	-	**-**
		c	-	-	-	-	**-**
		b	2	16	-	-	**18**
		a	-	39	33	18	**90**
2	Golongan III	d	-	1	43	94	**138**
		c	-	1	6	111	**118**
		b	-	-	1	163	**164**
		a	-	-	-	148	**148**
3	Golongan II	d	-	-	-	30	**30**
		c	-	-	-	48	**48**
		b	-	-	-	45	**45**
		a	-	-	-	-	**-**
4	Golongan I	d	-	-	-	3	**3**
		c	-	-	-	1	**1**
		b	-	-	-	1	**1**
		a	-	-	-	-	**-**
JUMLAH			**2**	**57**	**83**	**662**	**804**

1.5 ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah tingginya resistensi dan ekspetasi terhadap pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

1.6 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum keberadaan dan kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam :

1. Ketentuan Umum Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
2. Ketentuan Material Pajak Daerah yaitu terdiri dari :
   a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
   b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
   c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
   e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
   f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.
   g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
   h. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
   i. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
k. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
l. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
6. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9. Peraturan Gubernur Nomor 299 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi.
10. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi wilayah yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan masa jabatan Kepala Daerah dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam RKPD Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dengan tujuan untuk memberi arah kemana dan bagaimana suatu SKPD harus dibawa agar tetap eksis dan berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan pernyataan *(Statement)* tentang mau dijadikan apa organisasi dikemudian hari. Pernyataan visi merupakan pernyataan filosofis, namun pernyataan ini hendaknya menjadi jiwa yang mengarahkan segala tindakan sehingga apa yang diharapkan dalam visi tersebut dapat terwujud.

Sebagai pernyataan yang bersifat filosofis, visi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan arah tindakan dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karenanya pernyataan visi bersifat positif dan harus merangsang setiap unsur organisasi berpikir ke arah visi dimaksud. Pernyataan visi sekalipun mencakup jauh kedepan, harus tetap berpijak pada kenyataan pada saat visi tersebut dirumuskan.

Misi juga merupakan suatu pernyataan, misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu diemban oleh organisasi untuk mencapai visi yang ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi. Sebagai pernyataan, misi masih bersifat luas dan filosofis, tetapi lebih konkrit daripada visi.

Mengacu kepada visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, telah dirumuskan visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu :

VISI : *Menjadikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang Mampu Mewujudkan* ***Kemandirian Fiskal*** *dalam Pembangunan Kota Jakarta*

Penjelasan Visi:

Kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi antara lain :

MISI :
1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
2. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, telah dirumuskan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Pajak Daerah.
2. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Retribusi Daerah.

Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Penerimaan Pajak Daerah yang Optimal	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
2	Penerimaan Retribusi Daerah yang Optimal	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta 2 (dua) Indikator Kinerja. IKU Badan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Jumlah penerimaan pajak daerah	Jumlah rencana penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan
2	Jumlah penerimaan retribusi daerah	Jumlah rencana penerimaan retribusi daerah pada tahun berjalan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusun suatu Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan alat ukur dari suatu proses tentang memberikan perspektif mengenai tujuan dan hasil. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam penyusunan kegiatan prioritas yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 ditandatangani oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp 44.540.000.000.000
		Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp 710.131.000.000
		Presentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17) pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	100%
		Presentase Penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One (nomor 43)	100%
		Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%
		Persentase pemutakhiran data dan informasi data aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta	100%
		Persentase UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	100%
		Jumlah pemutakhiran data strategis OPD pada Portal Data.	12 Data Set

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Rp. 179.154.761.812	APBD-P
2	Program Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 0	APBD-P

3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku salah satu instansi pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas masing-masing indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	> 100%	Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas, Badan Pajak dan Retribusi Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah	44.540.000.000.000	40.300.337.741.155	90,48%
		Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rupiah	710.131.000.000	566.160.800.068	79,73%
		Presentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	Persen	100	100	100,00%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	Persen	100	93,19	93,19%
		Presentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One (nomor 43)	Persen	100	100	100,00%
		Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK	Persen	100	100	100,00%
		Persentase pemutakhiran data dan informasi data aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta	Persen	100	100	100,00%

		Persentase UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Persen	100	100	100,00%
		Persentase progress updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi	Data Set	12	12	100,00%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					**95,93%**	

Secara keseluruhan rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2019 sebesar 95,93% atau tidak mencapai target. Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

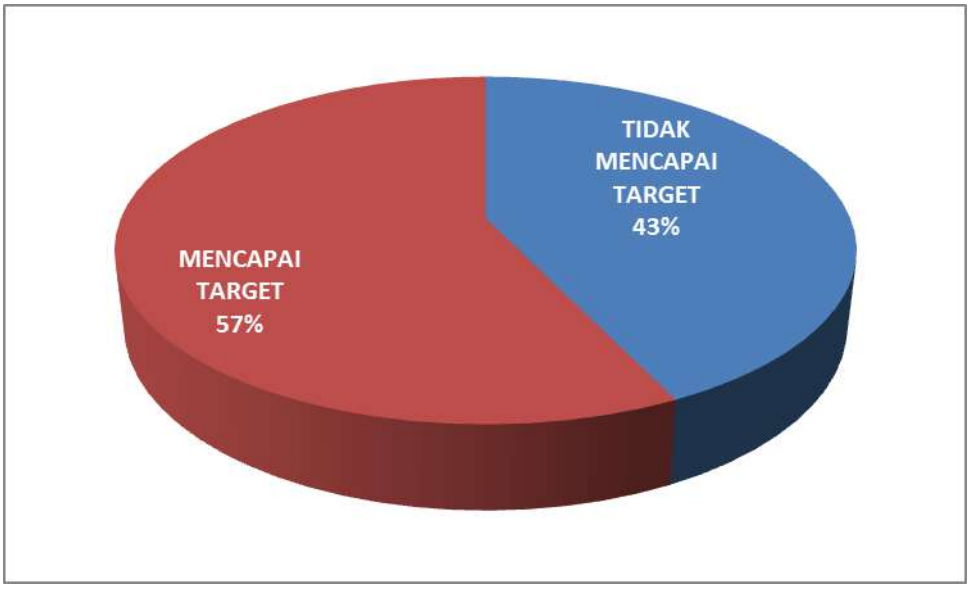

Pencapaian tersebut berdasarkan capaian kinerja yang mencapai target ditunjukan pada 6 (enam) indikator yaitu Presentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB), Presentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One, Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), Persentase pemutakhiran data dan informasi data aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta, Persentase UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Persentase progress updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi dengan capaian kinerja 100%.

Sementara capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja 90,48%, Jumlah penerimaan retribusi daerah dengan capaian kinerja 79,73%, Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 93,19%.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja.

Tahun 2019 merupakan periode pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 antara lain diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi

Sebagai perwujudan atas Sasaran tersebut, dengan jumlah indikator sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja utama dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah	44.540.000.000.000	40.300.337.741.155	90,48%
2	Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rupiah	710.131.000.000	566.160.800.068	79,73%
3	Presentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	Persen	100	100	100,00%
4	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)		100	93.19	93,19%
5	Presentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta	Persen	100	100	100,00%
6	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100,00%
7	Persentase pemutakhiran data dan informasi data aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta	Persen	100	100	100,00%
8	Persentase UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Persen	100	100	100,00%
9	Jumlah pemutakhiran data strategis OPD pada Portal Data	Set	12	12	100,00%

Dalam pencapaian Indikator Kinerja **"*Jumlah penerimaan pajak daerah*"** dengan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah memiliki kegiatan sebanyak 130 (Seratus tiga puluh), dari 37 kegiatan ini, 127 (serratus dua puluh tujuh atau sebesar 69,93% yang dilaksanakan. Dengan kata lain 3 (tiga) kegiatan dimatikan (8,11%). Dari 127 kegiatan yang dilaksanakan, dengan total capaian serapan

adalah sebesar Rp. 125.287.502.221,- atau sebesar 69,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 179.154.761.812,-.

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor memiliki kegiatan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan 100% (136 kegiatan) dengan total anggaran sebesar Rp. 128.333.809.424 dengan realisasi sebesar Rp. 99.658.107.686 (77,65%). Untuk Program Program Pengelolaan Kendaraan Operasional memiliki 3 kegiatan yang dilakukan keseluruhan (100%) dengan pagu anggaran sebesar Rp4.374.381.221 dengan realisasinya sebesar Rp2.987.247.267 (68,29%).

Adapun pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam program tersebut memiliki kendala-kendala sebagai berikut :

a. Rata-rata kegiatan terdapat efisiensi lelang yang cukup besar
b. Rendahnya realisasi penyerapan kegiatan Pembangunan Gedung UPPRD Kebon Jeruk, Jatinegara dan Makasar dikarenakan adanya perubahan kebijakan.
c. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pajak di Gerai yang realisasinya rendah dikarenakan selisih harga komponen.

3.3 AKUNTABILITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Dinas Pelayanan Pajak mengelola 13 (tiga belas) jenis pajak daerah yang merupakan gabungan daripada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah yang dikelola/dipungut oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 13 jenis pajak daerah, antara lain :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4) Pajak Air Tanah (PAT)
5) Pajak Hotel
6) Pajak Restoran
7) Pajak Hiburan
8) Pajak Reklame
9) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
10) Pajak Parkir
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
12) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
13) Pajak Rokok

Berdasarkan hasil kinerja penerimaan pajak daerah dan reribusi daerah yang telah dicapai oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

3.3.1 CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

Secara umum realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp. 40.300.337.741.155,- atau 90,48% dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp. 44.540.000.000.000,-, defisit sebesar Rp. 4.239.662.258.845,- atau 9,52%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 2.740.320.499.075,- atau meningkat sebesar 7,3% dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 yaitu sebesar Rp.

37.560.017.242.080,-. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	JENIS PAJAK	RENCANA APBD 2019	TOTAL REALISASI PENERIMAAN sd. 31 Dec 2019	RENCANA APBD 2018	TOTAL REALISASI PENERIMAAN sd. 31 Dec 2018	SELISIH YOY (4-6)	4:3	6:5	4:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.01	PKB	8.800.000.000.000	8.844.020.904.421	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	290.388.699.778	100,50%	102,44%	103,39%
4.1.1.02	BBN-KB	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	52.909.831.900	95,64%	104,91%	100,99%
4.1.1.03	PBB-KB	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467	1.200.000.000.000	1.244.763.661.522	17.985.190.945	99,04%	103,73%	101,44%
4.1.1.04	Pajak Air Tanah	110.000.000.000	125.352.113.150	145.000.000.000	106.495.794.526	18.856.318.624	113,96%	73,45%	117,71%
4.1.1.05	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.768.198.141.531	1.700.000.000.000	1.743.175.778.670	25.022.362.861	98,23%	102,54%	101,44%
4.1.1.06	Pajak Restoran	3.550.000.000.000	3.615.263.427.925	3.150.000.000.000	3.156.460.833.185	458.802.594.740	101,84%	100,21%	114,54%
4.1.1.07	Pajak Hiburan	850.000.000.000	860.666.265.952	900.000.000.000	833.995.184.988	26.671.080.964	101,25%	92,67%	103,20%
4.1.1.08	Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.081.128.617.233	1.150.000.000.000	1.014.794.778.877	66.333.838.356	102,96%	88,24%	106,54%
4.1.1.09	Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	814.112.934.989	825.000.000.000	787.107.000.016	27.005.934.973	100,51%	95,41%	103,43%
4.1.1.10	Pajak Parkir	525.000.000.000	537.128.072.254	550.000.000.000	513.583.137.467	23.544.934.787	102,31%	93,38%	104,58%
4.1.1.11	BPHTB	9.500.000.000.000	5.735.504.432.533	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	1.026.598.079.512	60,37%	78,48%	121,80%
4.1.1.13	Pajak Rokok	620.000.000.000	610.105.644.656	555.000.000.000	632.293.885.585	-22.188.240.929	98,40%	113,93%	96,49%
4.1.1.14	PBB-P2	10.000.000.000.000	9.642.572.899.294	8.500.000.000.000	8.893.076.200.170	749.496.699.124	96,43%	104,62%	108,43%
JUMLAH		**44.540.000.000.000**	**40.300.337.741.155**	**38.125.000.000.000**	**37.538.910.415.520**	**2.761.427.325.635**	**90,48%**	**98,46%**	**107,36%**

Catatan : Angka berdasarkan hasil rekonsiliasi (*unaudited*)

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa dari 13 (tiga belas) jenis Pajak Daerah, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang mencapai target Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Pajak Air Tanah
3) Pajak Restoran
4) Pajak Hiburan
5) Pajak Parkir
6) Pajak Reklame
7) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Sedangkan terdapat 6 (enam) jenis Pajak Daerah tidak mencapai target penerimaan, yaitu :

1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
3) Pajak Hotel
4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
6) Pajak Rokok

A. RINCIAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

Mengingat potensi yang besar dari pajak daerah menjadikannya sebagai salah satu pendukung pembiayaan daerah yang sangat potensial. Berikut ini disampaikan rencana dan realisasi penerimaan per jenis pajak daerah sebagai berikut :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 8.844.020.904.421,- atau 100,50% dari

rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.800.000.000.000,-.

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 5.403.535.434.750,- atau 95,64%.dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.650.000.000.000,-.

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.262.748.852.467,- atau 99,04% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.275.000.000.000,-.

4) **Pajak Air Tanah (PAT)**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah Rp. 125.352.113.150,- atau 113,96% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 110.000.000.000,-.

5) **Pajak Hotel**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.768.198.141.531.,- atau 98,23% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000.000.000,-.

6) **Pajak Restoran**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 3.615.263.427.925,- atau 101,84% dari

rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.550.000.000.000,-.

7) **Pajak Hiburan**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 860.666.265.952,- atau 101,25% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 850.000.000.000,-.

8) **Pajak Reklame**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.081.128.617.233,- atau 102,96% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.050.000.000.000,-.

9) **Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 814.112.934.989,- atau 100,51% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 810.000.000.000,-.

10) **Pajak Parkir**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 537.128.072.254,- atau 102,31% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000.000,-.

11) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 5.735.504.432.533,- atau 60,37% dari

rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.500.000.000.000,-.

12) Pajak Rokok

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 610.105.644.656,- atau 98,40% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 620.000.000.000,-.

13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 9.642.572.899.294,- atau sebesar 96,43% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.

B. PENJELASAN TERHADAP JENIS PAJAK YANG TIDAK TERCAPAI

Selanjutnya terhadap 6 (enam) jenis pajak yang tidak mencapai target Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Bahwa rencana penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp 5.650.000.000.000,- dan terealisir sebesar Rp 5.403.535.434.750,- (95,64%). Penerimaan BBNKB tersebut mengalami defisit/kekurangan sebesar Rp 246.464.565.250,- (4,36%) dari target yang ditetapkan, namun demikian realisasi BBNKB pada tahun 2019 tersebut tetap mengalami peningkatan dibandingkan

dengan 2 (dua) tahun sebelumnya (2017-2018) yang tergambar dalam grafik di bawah ini.

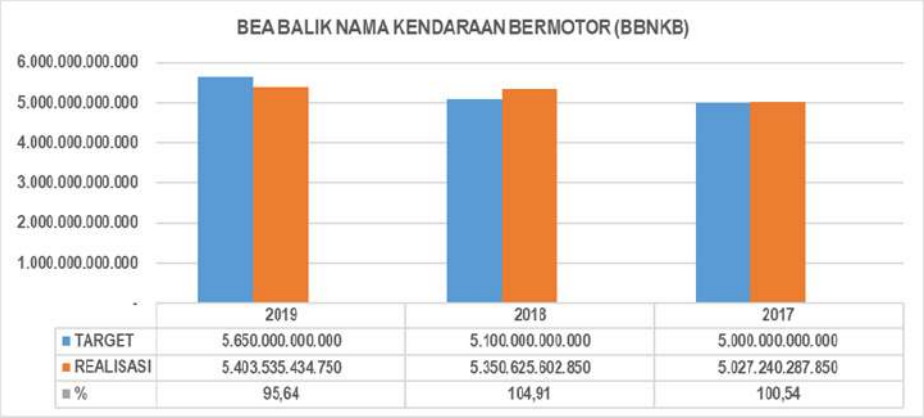

b. Beberapa kendala yang disinyalir menjadi penyebab terhambatnya penerimaan BBN-KB di tahun 2019, antara lain :

- Perda No 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda No 9 Tahun 2010 tentang peruhaban tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari 10% diundangkan tanggal 11 November 2019 dan berlaku pada tanggal 11 Desember 2019 sementara target BBN-KB APBD-P dengan kenaikan Rp 250.000.000.000,- sudah memperhitungkan kenaikan tarif.
- Pada masa pengurangan pokok BBN-KB untuk kendaraan kedua dan seterusnya, wajib pajak yang melakukan proses balik nama untuk KBm kedua dan seterusnya secara rata-rata tidak meningkat signifikan sehingga rata-rata penerimaan BBN-KB untuk KBm kedua dan seterusnya juga menurun pada masa pengurangan.
- Transaksi penjualan KBm pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak diiringi dengan pelaporan wajib pajak untuk *update* data kepemilikan KBm.
- Pada semester I tahun 2019, situasi politik belum kondusif sehingga mempengaruhi penjualan mobil secara nasional pada 2019 sebagaimana dicatat Gaikindo, penjualan mobil pada Januari s.d November 2019 hanya mencapai 940.362 unit yang menurun 11,5% jika dibandingkan secara *year to year* dengan tahun 2018, sebesar 1,06 juta.
- BPS DKI Jakarta mencatat industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer di DKI Jakarta mengalami

pertumbuhan negatif dimana pertumbuhan industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sampai dengan triwulan III 2019 turun 16.78% secara *year to year* jika dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama.

c. Merujuk pada kendala-kendala tersebut di atas dan guna memaksimalkan penerimaan BBNKB di tahun 2019, telah dilakukan beberapa upaya-upaya, antara lain :

- Menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB yang mengatur perubahan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%.
- Menerapkan kebijakan pengurangan pokok sebagai stimulus agar data kepemilikan atas kendaraan ke-2 dan seterusnya lebih akurat melalui Peraturan Gubernur No 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya.
- Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai stimulus optimalisasi penerimaan BBN-KB berdasarkan Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2019.
- Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

a) Realisasi Penerimaan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) s.d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.262.748.852.467 atau 99.04% dari target APBD-P tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.275.000.000.000,-.

b) Jika dibandingkan dengan realisasi s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.244.763.661.522 Miliar, penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.17,98 Miliar atau sebesar 1,44%.

c) Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB-KB antara lain sebagai berikut:

- Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, bahwa mekanisme pemungutan PBBKB hanya dikenakan satu kali terhadap transaksi/penjualan bahan bakar, meskipun terhadap bahan bakar tersebut terjadi lebih dari satu kali transaksi/penjualan di Jakarta.
- Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat terhadap daya beli kendaraan bermotor, yang secara teknis mempengaruhi penurunan transaksi/penjualan bahan bakar di Jakarta.

- Beralihnya moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke jasa transportasi online.
- Masih adanya pemungutan PBBKB yang didasarkan pada asas pemanfaatan dan bukan berdasarkan lokasi transaksi penjualan atau titik serah berdasarkan penerbitan Delivery Order (DO).
- Banyaknya kendaraan yang melakukan transaksi/pembelian bahan bakar minyak di luar wilayah DKI Jakarta, mengingat kebanyakan orang yang bekerja di Jakarta, berdomisili di luar wilayah Jakarta.
- Kenaikan harga bahan bakar terjadi hanya satu kali di awal tahun, yang kemudian di pertengahan tahun mengalami penurunan kembali, sehingga tidak terjadi peningkatan terhadap penerimaan yang signifikan (harga bahan bakar minyak mengikuti fluktuasi harga minyak dunia).
- Masih terjadinya penyetoran PBBKB berdasarkan jenis peruntukan/klasifikasi penggunaan, khususnya sektor industri dan sektor pertambangan dan kehutanan.

3. Pajak Hotel

a. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel s.d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.768.198.141.531atau 97,86% dari target APBD-P tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000.000.000,-.

b. Jika dibandingkan dengan realisasi s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.743.175.778.670, penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,02 Miliar atau sebesar 1,44%.

c. Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hotel antara lain sebagai berikut:

- Penurunan laju objek pajak Hotel Tahun 2019 yaitu dilihat dengan adanya penurunan laju Objek Pajak Hotel 609 Objek Pajak pada Tahun 2018 menurun menjadi 480 Objek Pajak pada Tahun 2019
- Penurunan tingkat Penghuni kamar Hotel Berbintang di DKI Jakarta yang sebelumnya 65.56% pada tahun 2018 menjadi 60.22% pada Tahun 2019 atau menurun sebesar 5.34%. Tahun 2018 merupakan tingkat hunian hotel berbintang terbaik pada 6 tahun terakhir dikarenakan terdapat perhelatan Asian Games di Jakarta. Pada tahun 2019, kinerja perhotelan dari tingkat hunian secara rata-rata pada mengalami penurunan dibanding tahun 2018.
- Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (tamu asing) ke Indonesia mengalami penurunan karena adanya kehati-hatian dari calon wisatawan berkaitan dengan tahun politik adanya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019.
- Penurunan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia yang berwisata ke manca negara dibandingkan berlibur ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta yang berdampak pada menurunnya hunian hotel-hotel di Jakarta. Hal ini juga

dikarenakan sudah beralihnya preferensi masyarakat atas liburan antar kota menjadi antar negara dikarenakan harga tiket transportasi angkutan udara (pesawat) untuk rute internasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tiket domestik.

- Adanya berbagai aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah seperti : *red doorz, oyo, airy* dll membuat beralihnya preferensi masyarakat dari hotel berbintang ke hotel kelas budget.

d. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan Pajak Hotel tahun 2019, antara lain:

- Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak obyek pajak hotel
- Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a) Realisasi Penerimaan BPHTB s.d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 5,74 Triliun atau 60,37% dari target APBD tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9,5 Triliun.

b) Jika dibandingkan dengan realisasi s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4,7 triliun, penerimaan BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,02 triliun atau sebesar 21,8%.

c) Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan BPHTB antara lain sebagai berikut:

- banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;

- Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- Banyaknya Pengelola/Pengembang Apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);
- Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya);
- Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
    - Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian property dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.

d) Upaya–upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan BPHTB tahun 2019, antara lain :

- Melakukan pendataan terhadap apartemen yang sudah dilakukan pertelaan namun belum Akta Jual Beli (Dibuatkan Instruksi bagi Apartemen yang sudah dipecah sertifikat agar segera melakukan penandatanganan AJB dan ditagih BPHTB);
- Penyusunan draft Pergub tentang transaksi PPJB menjadi objek BPHTB (telah diterbitkan Pergub No. 117 Tahun 2019 tentang penyetoran BPHTB atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2019);
- Melaksanakan penagihan dengan didampingi kejati dan KPK RI;
- Setiap UPPRD dalam melakukan validasi membuat data pembanding yang di publish di internet/ transaksi yang serupa, jika ada perbedaan data dibawah 15% WP memberikan surat kuasa untuk pengecekan transaksi pada rekening WP dan melakukan pengecekan lapangan
- Pengawasan objek BPHTB yang berubah bentuk/ukuran;

3.3.2 CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp. 587.535.570.632,- atau 82,74% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp. 710.131.000.000,-, defisit sebesar Rp. 122.595.429.368,- atau -17,26%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 menurun sebesar Rp. 29.068.565.141,- atau lebih rendah sebesar 4,69% dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 620.279.033.764,-. Adapun rincian realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	KETERANGAN	RENCANA APBD 2019	REALISASI PENERIMAAN sd. 31 Des 2019	RENCANA APBD-P 2018	REALISASI PENERIMAAN sd. 31 Des 2018	SELISIH YOY (4-6)	(4:3)	(6:5)	(4:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	132.527.067.232	102.114.000.000	125.626.566.297	6.900.500.935	116,15%	123,03%	105,49%
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	178.172.378.820	150.626.000.000	164.409.737.068	13.762.641.752	102,23%	109,15%	108,37%
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	421.750.000.000	276.836.124.580	418.750.000.000	301.174.165.258	-24.338.040.678	65,64%	71,92%	91,92%
JUMLAH		**710.131.000.000**	**587.535.570.632**	**671.490.000.000**	**591.210.468.623**	**-3.674.897.991**	**82,74%**	**88,04%**	**99,38%**

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa dari 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) jenis retribusi daerah yang mencapai target penerimaan tahun anggaran 2019 yaitu Retribusi Jasa Umum yang terealisir sebesar Rp. 132.527.067.232,- atau 116,15% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 114.097.000.000,- dan Retribusi Jasa Usaha yang terealisir sebesar Rp. 178.172.378.820,- atau 102,23% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 174.284.000.000,-.

Sedangkan 1 (satu) jenis Retribusi Daerah yang tidak mencapai target penerimaan, yaitu Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu terealisir sebesar Rp. 276.836.124.580,- atau 71,92% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 421.750.000.000,-.

A. RINCIAN PENCAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 132.527.067.232,- atau 116,15% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 102.114.000.000,-.

2) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 178.172.378.820,- atau 102,23% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 174.284.000.000,-.

3) Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp. 276.836.124.580,- atau 65,64% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 421.750.000.000,-.

B. PENJELASAN TERHADAP JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK TERCAPAI

Kendala-kendala dalam pencapaian penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran 2019, antara lain sebagai berikut :

1) Belum sepenuhnya kewenangan pengelolaan pelayanan pemungutan retribusi daerah diserahkan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Antara lain system E-Retribusi, system SIMPAD, dan penunjang pelayanan pemungutan retribusi daerah lainnya.
2) Belum optimalnya mekanisme pelayanan pemungutan retribusi daerah, seperti pelayanan pembayaran retribusi daerah, dan lain sebagainya.
3) Belum optimalnya perluasan basis beberapa jenis retribusi daerah karena terbentur peraturan perundang-undangan yang bersifat *close-list*.
4) Beralihnya beberapa jenis objek retribusi daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
5) Menurunnya jumlah Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan/perizinan.
6) Masih rendahnya tarif beberapa jenis retribusi.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Selama tahun anggaran 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 Provinsi DKI Jakarta DPA Perubahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.157.119.740.457,- dengan pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 859.520.006.552,- atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 74,28%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun anggaran 2019 memiliki Silpa sebesar Rp. 297.259.080.320,-.

Adapun rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta DPA Perubahan tahun anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	PENYERAPAN ANGGARAN	(4:3)
1	2	3	4	5
1	Belanja Langsung	306.699.452.143	223.110.010.445	72,75%
2	Belanja Langsung Suban	5.163.500.314	4.822.846.729	93,40%
3	Belanja Tidak Langsung	845.256.788.000	631.587.149.378	74,72%
Jumlah		**1.157.119.740.457**	**859.520.006.552**	**74,28%**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui

dari capaian kinerja anggaran yang diserap pada tahun anggaran 2019 sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Penyerapan Anggaran Kegiatan Perubahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
BELANJA LANGSUNG								
1.	**3.02.05**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah**				**177.075.423.862**	**123.441.885.167**	**69,71**
			1	3.02.05.001	Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)	366.324.652	294.085.000	80,28
			2	3.02.05.002	Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Pengiriman Pegawai mengikuti Kegiatan Diklat/Sejenisnya	388.837.500	388.000.000	99,78
			3	3.02.05.003	Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	199.164.152	197.480.000	99,15
			4	3.02.05.004	Perbaikan Gedung Samsat	4.544.660.245	3.495.693.341	76,92
			5	3.02.05.008	Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Duren Sawit	3.779.618.033	3.042.761.550	80,50
			6	3.02.05.009	Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Cengkareng	16.623.718.617	15.255.517.817	91,77

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			7	3.02.05.010	Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Palmerah	5.763.301.463	4.945.580.868	85,81
			8	3.02.05.011	Pembangunan Gedung UPPRD Cilandak	15.167.568.009	13.198.169.000	87,02
			9	3.02.05.015	Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Pajak dan Retribusi	147.840.000	75.600.000	51,14
			10	3.02.05.017	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	1.142.850.000	1.142.850.000	100,00
			11	3.02.05.018	Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	95.336.218.949	74.851.962.218	78,51
			12	3.02.05.019	Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak	1.475.932.557	844.838.500	57,24

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			13	3.02.05.020	Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah	1.475.114.300	699.864.000	47,44
			14	3.02.05.021	Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan	2.692.827.478	2.242.313.700	83,27
			15	3.02.05.022	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	60.531.970	60.531.970	100,00
			16	3.02.05.023	Pelaksanaan Pelayanan Pajak di Gerai Pelayanan Pajak di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	99.542.400	69.663.360	69,98
			17	3.02.05.024	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	165.000.000	165.000.000	100,00
			18	3.02.05.025	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	80.188.520	80.188.520	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			19	3.02.05.026	Pelaksanaan Pelayanan Pajak di Gerai Pelayanan Pajak di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	149.313.600	130.552.873	87,44
			20	3.02.05.027	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	165.000.000	165.000.000	100,00
			21	3.02.05.028	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	69.078.950	69.078.950	100,00
			22	3.02.05.029	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	165.000.000	165.000.000	100,00
			23	3.02.05.030	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	78.117.980	78.117.980	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			24	3.02.05.031	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	165.000.000	165.000.000	100,00
			25	3.02.05.032	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	59.426.740	54.578.920	91,84
			26	3.02.05.033	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	165.000.000	165.000.000	100,00
			27	3.02.05.120	Penyediaan Sewa Gedung UPPRD Kebon Jeruk	396.000.000	360.000.000	90,91
			28	3.02.05.121	Perencanaan Pembangunan Gedung UPPRD Kebon Jeruk	507.144.088	332.776.400	65,62
			29	3.02.05.122	Perencanaan Pembangunan Gedung UPPRD Jatinegara dan Makasar	507.144.088	332.807.200	65,62

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN			REALISASI		
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			30	3.02.05.124	Penyediaan Sewa Gedung UPPRD Cilandak	505.032.000	325.000.000	64,35
			31	3.02.05.125	Penyediaan Pendukung Sensus Pajak	24.586.054.571		-
			32	3.02.05.126	Pembayaran Hutang atas Jasa Konsultasi Penilai Publik	48.873.000	48.873.000	100,00
	3.02.07	**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah**				**125.249.647.060**	**96.680.878.011**	**77,19**
			1	3.02.07.001	Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan	8.394.802.057	8.319.506.895	99,10
			2	3.02.07.002	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	26.670.860.865	16.313.720.677	61,17

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			3	3.02.07.003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	630.464.571	585.208.250	92,82
			4	3.02.07.004	Penyediaan alat tulis kantor	3.802.523.670	3.283.405.150	86,35
			5	3.02.07.005	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.789.400	4.200.000	87,69
			6	3.02.07.006	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	8.957.798.645	8.786.936.043	98,09
			7	3.02.07.007	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	11.552.996.879	10.879.778.405	94,17
			8	3.02.07.008	Penyediaan peralatan rumah tangga	448.837.576	247.191.615	55,07
			9	3.02.07.009	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	215.490.088	189.143.783	87,77
			10	3.02.07.010	Perbaikan Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah	11.726.982.453	7.249.807.325	61,82

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			11	3.02.07.011	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	6.154.531.169	5.149.085.187	83,66
			12	3.02.07.012	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Komputer Kantor	1.680.353.144	1.633.165.475	97,19
			13	3.02.07.013	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	1.646.015.881	1.619.797.572	98,41
			14	3.02.07.014	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	326.700.000	119.260.000	36,50
			15	3.02.07.015	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	21.050.503.705	17.236.354.146	81,88
			16	3.02.07.016	Pemeliharaan Lift	1.409.562.146	855.738.703	60,71
			17	3.02.07.017	Penyediaan sewa mesin fotokopi	2.989.258.272	1.490.720.000	49,87
			18	3.02.07.018	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.063.334.774	11.195.022.800	69,69
			19	3.02.07.019	Penyediaan makanan dan minuman	1.227.537.260	1.226.871.830	99,95
			20	3.02.07.020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	6.968.040	6.968.040	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			21	3.02.07.021	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	38.224.520	38.224.520	100,00
			22	3.02.07.022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	9.665.475	9.665.475	100,00
			23	3.02.07.023	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	60.474.530	60.465.860	99,99
			24	3.02.07.024	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	9.316.460	9.316.170	100,00
			25	3.02.07.025	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	48.389.550	48.389.550	100,00
			26	3.02.07.026	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	8.030.800	8.030.800	100,00
			27	3.02.07.027	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	72.164.350	72.164.350	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
			28	3.02.07.028	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	3.567.070	3.567.070	100,00
			29	3.02.07.029	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	39.503.710	39.172.320	99,16
	3.02.08	**Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah**				**4.374.381.221**	**2.987.247.267**	**68,29**
			1	3.02.08.001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	1.910.311.200	1.319.280.000	69,06
			2	3.02.08.002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	340.516.930	166.090.700	48,78
			3	3.02.08.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	2.123.553.091	1.501.876.567	70,72
		TOTAL BELANJA LANGSUNG				**306.699.452.143**	**223.110.010.445**	**72,75**

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
BELANJA LANGSUNG - SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH								
1.	**3.02.05**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah**				**2.079.337.950**	**1.845.617.054**	**88,76**
			1	3.02.05.001	Sosialisasi Pajak Daerah	36.597.165	33.720.150	92,14
			2	3.02.05.002	Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	68.712.655	48.810.000	71,03
			3	3.02.05.003	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cengkareng	6.465.000	6.465.000	100,00
			4	3.02.05.004	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cengkareng	39.600.000	39.600.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			5	3.02.05.005	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Grogol Petamburan	10.168.000	10.168.000	100,00
			6	3.02.05.006	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Grogol Petamburan	24.750.000	24.750.000	100,00
			7	3.02.05.007	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kalideres	9.165.000	9.165.000	100,00
			8	3.02.05.008	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kalideres	24.750.000	24.750.000	100,00
			9	3.02.05.011	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kebon Jeruk	8.500.000	8.500.000	100,00
			10	3.02.05.012	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kebon Jeruk	33.000.000	33.000.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			11	3.02.05.013	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kembangan	13.218.000	13.218.000	100,00
			12	3.02.05.014	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kembangan	16.500.000	16.500.000	100,00
			13	3.02.05.015	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Palmerah	15.350.000	15.350.000	100,00
			14	3.02.05.016	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Palmerah	45.375.000	45.375.000	100,00
			15	3.02.05.017	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Taman Sari	26.320.000	26.320.000	100,00
			16	3.02.05.018	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Taman Sari	27.225.000	27.225.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			17	3.02.05.019	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tambora	9.165.000	9.165.000	100,00
			18	3.02.05.020	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Tambora	4.950.000	4.950.000	100,00
			19	3.02.05.001	Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah	26.103.260	26.103.100	100,00
			20	3.02.05.002	Pelaksanaan Penagihan AKtif dengan Surat Paksa Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	34.466.200	8.380.000	24,31
			21	3.02.05.003	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cempaka Putih	14.823.150	14.693.000	99,12
			22	3.02.05.004	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cempaka Putih	19.800.000	19.500.000	98,48
			23	3.02.05.006	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Gambir	39.600.000	38.633.550	97,56

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			24	3.02.05.007	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Menteng	18.689.370	18.538.050	99,19
			25	3.02.05.008	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Menteng	39.600.000	39.600.000	100,00
			26	3.02.05.009	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tanah Abang	18.607.570	18.551.050	99,70
			27	3.02.05.010	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Tanah Abang	49.500.000	49.483.500	99,97
			28	3.02.05.011	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Gambir	20.263.830	20.043.450	98,91
			29	3.02.05.012	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Johar Baru	9.078.218	9.041.650	99,60
			30	3.02.05.013	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Johar Baru	1.237.500	1.125.000	90,91
			31	3.02.05.014	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Sawah Besar	18.469.450	18.465.050	99,98

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			32	3.02.05.015	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Sawah Besar	27.720.000	27.595.500	99,55
			33	3.02.05.016	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Senen	9.507.480	9.488.000	99,80
			34	3.02.05.017	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Senen	11.880.000	11.865.350	99,88
			35	3.02.05.018	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kemayoran	12.441.040	11.398.400	91,62
			36	3.02.05.019	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kemayoran	19.800.000	19.799.845	100,00
			37	3.02.05.001	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perpajakan Daerah Kepada Wajib Pajak	29.614.121	29.037.921	98,05
			38	3.02.05.002	Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	83.368.290	9.952.500	11,94

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN					REALISASI (Rp.)
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			39	3.02.05.003	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cilandak	8.191.970	8.110.200	99,00
			40	3.02.05.007	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Jagakarsa	12.302.550	12.302.550	100,00
			41	3.02.05.010	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kebayoran Baru	12.811.920	12.678.468	98,96
			42	3.02.05.011	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kebayoran Lama	7.440.000	7.440.000	100,00
			43	3.02.05.012	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kebayoran Baru	19.800.000	19.800.000	100,00
			44	3.02.05.013	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cilandak	29.700.000	28.966.500	97,53
			45	3.02.05.015	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Jagakarsa	19.800.000	19.767.000	99,83
			46	3.02.05.016	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kebayoran Lama	24.936.600	24.930.600	99,98

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			47	3.02.05.017	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Mampang Prapatan	14.490.550	13.410.550	92,55
			48	3.02.05.018	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Mampang Prapatan	19.800.000	19.425.000	98,11
			49	3.02.05.019	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pancoran	8.432.670	8.432.620	100,00
			50	3.02.05.020	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pancoran	9.900.000	9.629.850	97,27
			51	3.02.05.021	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pasar Minggu	22.767.170	22.740.770	99,88
			52	3.02.05.022	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pasar Minggu	99.000.000	91.021.200	91,94
			53	3.02.05.023	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pesanggrahan	8.753.700	8.753.700	100,00
			54	3.02.05.024	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pesanggrahan	9.000.000	9.000.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			55	3.02.05.025	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Setiabudi	18.921.450	18.920.850	100,00
			56	3.02.05.026	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Setiabudi	19.800.000	18.300.000	92,42
			57	3.02.05.027	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tebet	7.050.000	7.050.000	100,00
			58	3.02.05.028	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Tebet	4.950.000	4.950.000	100,00
			59	3.02.05.001	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perpajakan Daerah Kepada Wajib Pajak	27.515.730	27.504.000	99,96
			60	3.02.05.002	Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	35.343.670	8.493.000	24,03
			61	3.02.05.004	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Duren Sawit	25.182.245	25.036.220	99,42

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			62	3.02.05.005	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Jatinegara	14.284.500	13.806.000	96,65
			63	3.02.05.006	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Matraman	10.257.774	9.988.600	97,38
			64	3.02.05.007	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pulo Gadung	17.225.600	17.216.800	99,95
			65	3.02.05.008	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cakung	22.886.365	22.296.150	97,42
			66	3.02.05.009	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Makasar	15.720.720	15.429.000	98,14
			67	3.02.05.010	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kramat Jati	14.585.944	14.215.000	97,46
			68	3.02.05.011	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pasar Rebo	13.675.120	13.553.200	99,11

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			69	3.02.05.012	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Ciracas	12.215.560	11.879.000	97,24
			70	3.02.05.013	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cipayung	36.986.088	35.275.700	95,38
			71	3.02.05.014	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Duren Sawit	24.750.000	23.925.000	96,67
			72	3.02.05.015	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Jatinegara	11.550.000	10.512.000	91,01
			73	3.02.05.016	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Matraman	9.900.000	7.293.000	73,67
			74	3.02.05.017	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pulo Gadung	60.000.000	58.716.000	97,86

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			75	3.02.05.018	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cakung	59.400.000	54.885.000	92,40
			76	3.02.05.019	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Makasar	5.940.000	5.400.000	90,91
			77	3.02.05.020	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kramat Jati	24.750.000	24.750.000	100,00
			78	3.02.05.021	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pasar Rebo	19.800.000	19.800.000	100,00
			79	3.02.05.022	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Ciracas	5.940.000	5.940.000	100,00
			80	3.02.05.023	Penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cipayung	5.940.000	4.950.000	83,33

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3			4	5	6	
			81	3.02.05.001	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perpajakan Daerah Kepada Wajib Pajak	29.811.541	29.628.000	99,38
			82	3.02.05.002	Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	53.807.390	2.704.000	5,03
			83	3.02.05.003	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Cilincing	5.898.120	5.508.000	93,39
			84	3.02.05.004	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Cilincing	1.980.000	1.980.000	100,00
			85	3.02.05.005	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kelapa Gading	7.534.060	7.534.060	100,00
			86	3.02.05.006	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Kelapa Gading	23.595.000	23.595.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			87	3.02.05.007	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Kepulauan Seribu	3.547.924	3.547.200	99,98
			88	3.02.05.008	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Koja	6.318.120	6.318.000	100,00
			89	3.02.05.009	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Koja	19.924.400	19.800.000	99,38
			90	3.02.05.010	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Pademangan	6.760.000	6.760.000	100,00
			91	3.02.05.011	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Pademangan	30.073.200	30.073.200	100,00
			92	3.02.05.012	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Penjaringan	6.385.000	6.385.000	100,00
			93	3.02.05.013	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Penjaringan	64.350.000	63.690.000	98,97
			94	3.02.05.014	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tanjung Priok	13.575.000	13.575.000	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			95	3.02.05.015	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di UPPRD Tanjung Priok	29.700.000	29.700.000	100,00
	3.02.07	**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah**				**3.084.162.364**	**2.977.229.675**	**96,53**
			1	3.02.07.001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.515.232	30.515.232	100,00
			2	3.02.07.002	Penyediaan makanan dan minuman	82.688.980	77.562.980	93,80
			3	3.02.07.003	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.902.376	9.902.376	100,00
			4	3.02.07.004	Penyediaan sewa mesin fotokopi	41.061.240	40.920.000	99,66
			5	3.02.07.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cengkareng	10.854.985	10.854.985	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			6	3.02.07.006	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cengkareng	24.845.020	24.845.020	100,00
			7	3.02.07.007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Grogol Petamburan	10.188.801	10.188.769	100,00
			8	3.02.07.008	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Grogol Petamburan	16.583.550	16.571.570	99,93
			9	3.02.07.009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kalideres	8.244.651	8.244.651	100,00
			10	3.02.07.010	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kalideres	31.310.480	31.310.480	100,00
			11	3.02.07.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kebon Jeruk	5.310.988	4.989.528	93,95
			12	3.02.07.012	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebon Jeruk	26.620.240	26.620.240	100,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			13	3.02.07.013	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kembangan	9.707.428	9.707.428	100,00
			14	3.02.07.014	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kembangan	28.475.940	28.475.940	100,00
			15	3.02.07.015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Palmerah	15.523.815	15.523.815	100,00
			16	3.02.07.016	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Palmerah	40.219.170	40.219.170	100,00
			17	3.02.07.017	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Taman Sari	23.002.397	23.002.397	100,00
			18	3.02.07.018	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Taman Sari	37.195.170	37.191.860	99,99
			19	3.02.07.019	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Tambora	14.280.183	14.072.783	98,55
			20	3.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tambora	28.807.400	23.549.200	81,75

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			21	3.02.07.001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.522.840	37.070.800	98,80
			22	3.02.07.002	Penyediaan sewa mesin fotokopi	41.061.240	40.260.000	98,05
			23	3.02.07.003	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.110.240	3.760.800	91,50
			24	3.02.07.004	Penyediaan makanan dan minuman	144.849.200	141.395.800	97,62
			25	3.02.07.005	Penyediaan Batang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cempaka Putih	5.232.145	5.004.575	95,65
			26	3.02.07.006	Penyediaan Makan dan Minuman di UPPRD Cempaka Putih	47.735.420	45.557.500	95,44
			27	3.02.07.007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Gambir	7.511.100	7.339.000	97,71
			28	3.02.07.008	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Gambir	48.525.300	48.038.000	99,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			29	3.02.07.009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Menteng	8.769.308	8.432.625	96,16
			30	3.02.07.010	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Menteng	54.096.670	53.764.300	99,39
			31	3.02.07.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Tanah Abang	4.455.488	4.398.025	98,71
			32	3.02.07.012	Penyediaan Makanan dan Minuman d UPPRD Tanah Abang	32.912.900	32.875.300	99,89
			33	3.02.07.013	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Johar Baru	6.042.123	5.979.250	98,96
			34	3.02.07.014	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Johar Baru	32.229.100	32.041.600	99,42
			35	3.02.07.015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Sawah Besar	9.588.638	9.560.410	99,71
			36	3.02.07.016	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Sawah Besar	35.922.200	34.737.600	96,70

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			37	3.02.07.017	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Senen	5.025.838	5.016.350	99,81
			38	3.02.07.018	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Senen	28.744.280	27.170.700	94,53
			39	3.02.07.019	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kemayoran	4.429.563	4.388.500	99,07
			40	3.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kemayoran	32.577.900	32.551.000	99,92
			41	3.02.07.001	Penyediaan sewa mesin fotokopi	41.061.240	41.032.320	99,93
			42	3.02.07.002	Penyediaan makanan dan minuman	100.197.700	99.832.795	99,64
			43	3.02.07.003	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.867.400	11.580.000	97,58
			44	3.02.07.004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.762.520	30.518.463	99,21
			45	3.02.07.007	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cilandak	43.067.070	42.546.470	98,79

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			46	3.02.07.009	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Jagakarsa	41.460.960	41.446.735	99,97
			47	3.02.07.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kebayoran Baru	4.573.035	4.573.035	100,00
			48	3.02.07.012	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Jagakarsa	9.666.942	9.521.762	98,50
			49	3.02.07.013	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cilandak	3.481.572	3.452.505	99,17
			50	3.02.07.014	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebayoran Baru	33.979.820	33.979.820	100,00
			51	3.02.07.015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kebayoran Lama	10.352.126	10.352.126	100,00
			52	3.02.07.016	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebayoran Lama	42.013.280	42.013.280	100,00
			53	3.02.07.017	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Mampang Prapatan	2.237.798	2.066.100	92,33
			54	3.02.07.018	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Mampang Prapatan	28.732.750	22.722.950	79,08

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			55	3.02.07.019	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pancoran	7.858.338	7.339.838	93,40
			56	3.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pancoran	34.482.300	34.470.200	99,96
			57	3.02.07.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pasar Minggu	9.379.424	9.223.888	98,34
			58	3.02.07.022	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pasar Minggu	60.960.850	60.901.000	99,90
			59	3.02.07.023	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pesanggrahan	4.462.163	4.462.162	100,00
			60	3.02.07.024	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pesanggrahan	34.224.950	34.048.650	99,48
			61	3.02.07.025	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Setiabudi	7.220.223	7.133.613	98,80
			62	3.02.07.026	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Setiabudi	36.822.700	36.822.700	100,00
			63	3.02.07.027	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Tebet	7.115.900	6.934.450	97,45

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			64	3.02.07.028	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tebet	42.178.290	42.052.290	99,70
			65	3.02.07.001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.502.985	28.302.060	92,78
			66	3.02.07.002	Penyediaan sewa mesin fotokopi	41.061.240	37.807.000	92,07
			67	3.02.07.003	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.552.180	9.552.180	100,00
			68	3.02.07.004	Penyediaan makanan dan minuman	110.870.000	96.028.850	86,61
			69	3.02.07.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Duren Sawit	12.702.490	11.974.790	94,27
			70	3.02.07.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Jatinegara	9.377.575	9.373.350	99,95
			71	3.02.07.007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Matraman	10.157.648	9.497.845	93,50

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			72	3.02.07.008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pulo Gadung	16.788.268	16.724.234	99,62
			73	3.02.07.009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cakung	18.565.668	11.194.745	60,30
			74	3.02.07.010	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Makasar	9.017.415	7.822.610	86,75
			75	3.02.07.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kramat Jati	17.247.736	16.328.710	94,67
			76	3.02.07.012	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pasar Rebo	15.667.005	15.225.165	97,18
			77	3.02.07.013	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Ciracas	8.395.335	7.744.455	92,25
			78	3.02.07.014	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cipayung	20.797.275	17.934.140	86,23
			79	3.02.07.015	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Duren Sawit	24.359.170	22.782.500	93,53

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			80	3.02.07.016	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Jatinegara	23.361.460	20.967.000	89,75
			81	3.02.07.017	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Matraman	18.882.920	15.658.500	82,92
			82	3.02.07.018	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pulo Gadung	64.535.660	64.010.500	99,19
			83	3.02.07.019	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cakung	39.288.875	32.377.610	82,41
			84	3.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Makasar	28.277.700	25.980.450	91,88
			85	3.02.07.021	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kramat Jati	42.684.290	41.942.050	98,26
			86	3.02.07.022	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pasar Rebo	46.658.640	46.086.350	98,77
			87	3.02.07.023	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Ciracas	23.513.680	23.229.050	98,79

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			88	3.02.07.024	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cipayung	40.083.700	36.939.500	92,16
			89	3.02.07.001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.889.740	10.958.800	61,26
			90	3.02.07.002	Penyediaan sewa mesin fotokopi	41.061.240	40.260.000	98,05
			91	3.02.07.003	Penyediaan makanan dan minuman	93.355.500	90.588.000	97,04
			92	3.02.07.004	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.036.840	9.022.800	99,84
			93	3.02.07.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cilincing	7.951.032	7.922.130	99,64
			94	3.02.07.007	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cilincing	22.544.940	22.311.660	98,97
			95	3.02.07.008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kelapa Gading	10.107.063	10.100.275	99,93
			96	3.02.07.009	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kelapa Gading	21.771.860	21.687.130	99,61

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			97	3.02.07.010	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kepulauan Seribu	4.547.148	4.527.280	99,56
			98	3.02.07.011	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kepulauan Seribu	19.033.680	19.030.200	99,98
			99	3.02.07.012	Penyediaan Sarana Prasarana dan Akomodasi UPPRD Kepulauan Seribu	257.871.856	257.529.000	99,87
			100	3.02.07.013	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Koja	8.522.260	8.429.310	98,91
			101	3.02.07.014	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Koja	17.589.480	17.088.150	97,15
			102	3.02.07.015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Pademangan	11.072.020	10.962.050	99,01
			103	3.02.07.016	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pademangan	40.566.570	40.538.740	99,93

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI (Rp.)	
			NO KEG	KODE KEG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
			104	3.02.07.017	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Penjaringan	5.274.718	5.266.875	99,85
			105	3.02.07.018	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Penjaringan	30.069.390	30.028.470	99,86
			106	3.02.07.019	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Tanjung Priok	7.466.092	6.582.900	88,17
			107	3.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tanjung Priok	41.243.130	36.274.550	87,95
		TOTAL BELANJA LANGSUNG - SUKU BADAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH				**5.163.500.314**	**4.822.846.729**	**93,40**
		TOTAL BELANJA LANGSUNG GABUNGAN - BPRD & SBPRD				**311.862.952.457**	**227.932.857.174**	**73,09**

BELANJA TIDAK LANGSUNG								
1		**Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil**				**98.656.543.000**	**75.961.301.609**	**77,00**
			1	5.1.1.01.03.001	Gaji Pokok	37.911.567.000	36.753.017.220	96,94
			2	5.1.1.01.03.002	Tunjangan Keluarga	4.276.791.000	4.135.495.796	96,70
			3	5.1.1.01.03.003	Tunjangan Jabatan	1.585.915.000	1.537.715.000	96,96
			4	5.1.1.01.03.006	Tunjangan Umum	1.666.405.000	1.621.105.000	97,28
			5	5.1.1.01.03.008	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja	50.710.209.000	29.823.720.706	58,81
			6	5.1.1.01.03.009	Tunjangan Beras	2.505.117.000	2.089.751.520	83,42
			7	5.1.1.01.03.010	Pembulatan Gaji	539.000	496.367	92,09
2		**Tunjangan Peningkatan Penghasilan**		**5.1.1.02.01.005**	**Tunjangan Peningkatan Penghasilan**	**70.339.532.000**	**67.019.154.083**	**95,28**
3		**Tunjangan Kinerja Daerah**		**5.1.1.02.05.002**	**Tunjangan Kinerja Daerah**	**102.498.791.000**	**-**	**-**

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	URAIAN				REALISASI	
			NO. KEG	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	SPJ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:7)
4		**Insentif Pemungutan Pajak Daerah**		**5.1.1.04.02**	**Insentif Pemungutan Pajak Daerah**	**566.246.922.000**	**481.960.658.686**	**85,11**
5		**Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)**		**5.1.1.10.01**	**Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)**	**7.515.000.000**	**6.646.035.000**	**88,44**
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG					**845.256.788.000**	**631.587.149.378**	**74,72**
	TOTAL BELANJA BL GABUNGAN & BTL					**1.157.119.740.457**	**859.520.006.552**	**74,28**

Berdasarkan tabel diatas, untuk Belanja Langsung terdapat 3 program yang terdiri dari Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah serta Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah terdapat 127 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.179.154.761.182, dengan realisasinya sebesar Rp. 125.287.502.221 (69,93%), sedangkan Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah yang memiliki 136 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 128.333.809.424 dengan realisasinya sebesar Rp. 99.658.107.686 (77,65%). Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah terdapat 3 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.374.381.221, yang realisasinya adalah Rp. 2.987.247.267 (68,29%). Sehingga total belanja langsung adalah sebanyak 266 kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 311.862.952.457 yang realisasinya adalah Rp. 227.932.857.174 (73,09%). Hal ini memerlukan perhatian yang khusus untuk ditingkatkan pada tahun depan Hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran diantaranya dengan persiapan secara baik dalam hal perencanaan dan perumusan anggaran kegiatan serta segera mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam hal pengadministrasian SPJ.

4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis dan penggambaran kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta evaluasinya terhadap hasil kerja baik yang tercapai sesuai dengan harapan maupun yang tidak. Laporan ini diharapkan mampu memenuhi tuntutan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana Akuntabilitas Kinerja digambarkan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada tahun 2019, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun sebanyak 9 (sembilan) indikator berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Hasil Reviu yang telah ditetapkan sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 ini adalah sebesar 95,93% yang termasuk dalam interpretasi tidak mencapai target.

A. PERMASALAHAN

Secara umum target kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah tercapai sesuai yang ditetapkan. Dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 859.520.006.552 (74,20%) dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 1.157.119.740.457 (APBD Perubahan 2019) dan sasaran strategis yang telah ditargetkan telah terlaksana dengan baik. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.40.300.337.741.155,- atau 90,48% dari target rencana penerimaan Pajak Daerah dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.44.540.000.000.000,-, defisit sebesar Rp. 4.239.662.258.845,- atau 9,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 37.538.894.327.312,- maka penerimaan Pajak Daerah tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.761.443.413.843 atau 7,36%.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp. 587.535.570.632,- atau 82,74% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp. 710.000.000.000,-, defisit sebesar Rp. 122.595.429.368,- atau -17,26%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 26.292.067.954,- atau lebih besar sebesar 4,68% dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 561.243502.678,-.

Namun dalam pelaksanaan kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak
2. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada sektor pembangunan dan pengembangan Sistem Pajak.
3. Rendahnya tingkat partisipasi *user* dari pihak internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Konsolidasi Data Pajak.
4. Rendahnya kepatuhan, keterbukaan, dan ketaatan pelaporan omzet dan data transaksi usaha oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

5. Tingginya tuntutan dari masyarakat agar Pemerintah secara optimal menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak yang ada.
6. Adanya rasa sensitivitas yang cukup tinggi dari pelaku usaha selaku wajib pajak kepada Pemerintah yang kaitannya dengan kerahasiaan sistem administrasi usahanya, sehingga Pemerintah harus betul-betul menjamin kerahasiaan data transaksi usaha hanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Gubernur DKI Jakarta.
7. Masih belum optimalnya penyerapan dan penggunaan anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak.
8. Masih terbatasnya metode pembayaran pajak daerah contohnya penggunaan Mobile Banking, dsb.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum dicapai, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif yang ditempuh, yaitu :

1. Melakukan penagihan piutang pajak dengan pendampingan atau supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Melakukan pendataan PBB-P2 (fiscal cadaster) dalam rangka pemutakhiran data
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam hal Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
5. Meningkatkan rasa keinginan Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Konsolidasi Data Pajak.

6. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat melalui evaluasi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan anggaran dan terkait pemungutan pajak.
8. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin.
9. Menghimpun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
10. Tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah seperti halnya perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi, dan *law enforcement*.